

PDIP Bombana Optimis Raih 5 Kursi DPRD dan Pilpres Raih 50 % Suara

Bombana, SultraNET. | Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bombana optimis mampu meraih 5 kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan meraih 50 Persen Suara Pemilihan Presiden untuk Ganjar-Mahfud pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPD PDIP Provinsi Sulawesi Tenggara, Hasrat, SH. saat memimpin Rapat Kerja dan pelantikan Pengurus Anak Cabang Kecamatan. Bertempat di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Sabtu (4/11/2024).

Pada kesempatan tersebut, DPD PDIP Sultra menegaskan komitmen kuat PDIP untuk meraih kemenangan pada Pemilu 2024. Fokus utama partai besutan Megawati Soekarno Putri ini adalah pada target perolehan 5 kursi di DPRD Bombana dan kemenangan Ganjar-Mahfud sebagai calon presiden dengan target 50 persen suara.

Hasrat, dalam penjelasannya, menekankan bahwa rapat kerja ini tidak hanya berkaitan dengan pelantikan pengurus ranting di 22 kecamatan. Lebih dari itu, ini merupakan wadah untuk merumuskan kebijakan partai.

“Rencana kerja kami adalah bagaimana memastikan kita bersama rakyat, merebut hati mereka, sehingga kita bisa menang di pemilihan mendatang,” tuturnya.



Rapat Kerja DPC PDIP Bombana

Dalam konteks pemilihan presiden, Hasrat mengajak seluruh kader dan simpatisan PDIP di Bombana untuk menggerakkan semua energi demi memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden dari PDIP.

“Saat ini, selain fokus pada pemilihan presiden, kami dihadapkan pada kontestan pemilihan legislatif. Semua itu membutuhkan semangat dan dukungan dari kader-kader dan simpatisan PDIP,” ungkap Hasrat.

Hasrat, yang merupakan mantan anggota dewan Bombana periode 2014/2019, menargetkan 5 kursi di DPRD Kabupaten Bombana pada pemilihan tahun 2024.

“Kami optimis dapat mencapai target ini, dan tentu saja, kami tidak akan berpangku tangan. Kami akan terus berada di lapangan,” tegasnya.

Sekretaris PDIP Provinsi Sultra menekankan pentingnya peran pengurus di semua tingkatan, mulai dari cabang hingga tingkat paling bawah, untuk aktif dalam mendukung pasangan Ganjar-Mahfud dan meningkatkan perolehan suara di Kabupaten Bombana.

“Di Bombana, kami optimis pasangan Ganjar Mahfud bisa memperoleh suara sebanyak 50 persen,” tandas Hasrat. **(IS)**

NPHD Pilkada Konawe Utara 2024 Resmi Ditandatangani

Kendari, SultraNET. | Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Konawe Utara, Kodim 1430 Konawe Utara, dan Polres Konawe Utara secara resmi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara tahun 2024. Penandatanganan NPHD ini berlangsung di Hotel Plaza Inn Kota Kendari pada hari Jumat, 6 Oktober 2023.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara mengungkapkan apresiasi terhadap kerja sama antara pemerintah daerah, KPU, Bawaslu, Kodim 1430, dan Polres Konawe Utara dalam menandatangani NPHD ini.

Ia juga menyampaikan rencana pemerintah pusat untuk memajukan agenda Pilkada dari bulan November 2024 menjadi bulan September 2024, dan penyelenggara pemilu tingkat Kabupaten Konawe Utara siap mengikuti perubahan tersebut.

“Kami, sebagai penyelenggara pemilu, siap menjamin pelaksanaan demokrasi di tingkat kabupaten. Partisipasi lalu mencapai 92,96% dan tertinggi di Sulawesi Tenggara, yang harus kami jaga dan tingkatkan,” ujarnya.



Foto Bersama usai Penandatanganan NPHD

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Utara menyatakan terima kasih kepada Pemerintah Daerah dan Kesbangpol Kabupaten Konawe Utara atas antusiasme mereka dalam menggelar acara penandatanganan NPHD ini. Ia menekankan pentingnya kerja sama dalam menjaga agar Pilkada tahun 2024 tetap kondusif.

“Semoga Pilkada di Kabupaten Konawe Utara dapat berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan bersama,” ujarnya.

Bupati Konawe Utara, H. Ruksamin, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga karena kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurutnya kegiatan hari ini menandai beberapa kegiatan yang sudah dilalui dalam rangka melaksanakan, mensukseskan Program Nasional yang masuk dalam Program Strategis Nasional.

“Hari ini, Insya Allah, kita akan menandatangani NPHD Kabupaten Konawe Utara sebesar 67 miliar Rupiah yang terdiri dari 45 miliar Rupiah untuk KPU Konawe Utara, 18 miliar Rupiah untuk Bawaslu Konawe Utara, 3 miliar Rupiah untuk Polres Konawe Utara, dan 1 miliar Rupiah untuk Kodim 1430 Konawe Utara,” bebernya.



Bupati Konut, H. Ruksamin

Bupati berharap bahwa pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 di Kabupaten Konawe Utara dapat berjalan dengan baik dan lancar dari tahap awal hingga akhir.

“Saya berharap KPU maupun Bawaslu dapat menjaga partisipasi dan antusiasme masyarakat sebagai pemilih agar dapat meningkat secara signifikan, dan pelaksanaan pemilu dan pilkada di Kabupaten Konawe Utara dapat berjalan dengan tertib, aman, dan kondusif,” pungkasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Konawe Utara, H. Ruksamin, Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Forkopimda Kabupaten Konawe Utara, Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara, Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Konawe Utara, Kepala OPD dan Kabag di Lingkungan Kabupaten Konawe Utara, serta undangan lainnya. (S)

Pj. Bupati Bombana Burhanuddin Silaturahmi dengan Warga Rarowatu Utara

Bombana, SultraNET. | Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, didampingi Pj. Ketua TP PKK Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, melaksanakan kunjungan kerja dan silaturahmi di Kecamatan Rarowatu Utara pada Minggu (1/10/2023). Acara ini turut dihadiri oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Rarowatu Utara, Lantari Jaya, dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, H. Burhanuddin menyampaikan bahwa menjadi wakil rakyat adalah tugas yang kadang mudah, kadang sulit. Sebagai wakil rakyat, penting untuk mengayomi masyarakat dengan bertemu langsung dan mendengar aspirasi mereka. Menurutnya, menjadi pemerintah berarti merendahkan diri kepada masyarakat, karena tugas utama adalah pelayanan kepada mereka.

“Menjadi pemerintah itu kita harus merendahkan diri kepada masyarakat karena tugas kita adalah pelayan masyarakat,” ungkapnya.

Beliau menekankan pentingnya memikul jabatan daripada hanya menduduki jabatan. Dalam pandangannya, memikul jabatan memiliki konotasi tanggung jawab yang tinggi, sementara menduduki jabatan bisa membuat seseorang terlena dan kurang fokus pada tugas pokok.

Pj. Bupati juga mengajak seluruh camat di lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana untuk konsisten dalam menjalankan tugas, fokus pada satu titik, dan terus memantau serta memahami permasalahan masyarakat. Beliau menegaskan bahwa pemerintah harus selalu peduli terhadap kebutuhan masyarakat.



Pj. Bupati Bombana saat berdialog dengan Warga Rarowatu Utara

“Tugas kita harus kita pikul, karena kalau kita menduduki suatu jabatan biasanya keenakan dan merasa enak duduk di kursi yang empuk, tetapi kita tidak tahu bahwa ada tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah SWT,” kata H. Burhanuddin.

Beliau berharap agar masyarakat dapat menjalin hubungan baik dengan pemerintah dan berkomunikasi secara baik-baik jika ada permasalahan yang perlu dibicarakan. Pj. Bupati Bombana menekankan bahwa selalu ada jalan keluar untuk setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Dengan pesan tersebut, kunjungan kerja dan silaturahmi di Kecamatan Rarowatu Utara diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat serta memastikan bahwa kebutuhan masyarakat tetap menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah. (*)

Sitti Nur Eva, Bacaleg Golkar Bombana, siap Wakili Suara Perempuan di DPRD

Bombana, SultraNET. | Keterlibatan perempuan dalam politik sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender. Keterlibatannya dapat mewakili kepentingan perempuan dalam pembuatan kebijakan, serta memastikan perspektif perempuan didengar dan dipertimbangkan.

Dalam pelaksanaan pesta demokrasi khususnya Pemilihan Legislatif (Pileg), Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara mewajibkan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pencalonan.

Sehingga dapat dinilai bahwa keterlibatan caleg perempuan sangat penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan mewakili suara perempuan dalam pembuatan kebijakan. Melalui partisipasi mereka dalam politik, perempuan dapat berperan aktif dalam menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Bombana telah memenuhi kewajiban tersebut dalam komposisi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPDR) Kabupaten Bombana untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya berkas pendaftaran bacelegnya oleh KPU setempat, Minggu (14/06/2023)

Sitti Nur Eva, salah satu Bacaleg perempuan DPD Partai Golkar Kabupaten Bombana Daerah Pemilihan (Dapil) 5 meliputi Kecamatan Kabaena, Kabaena Timur, Kabaena Barat, Kabaena Selatan, Kabaena Utara dan Kabaena Tengah.

Bacaleg kelahiran Desa Balo ini bertekad mewakili suara perempuan di DPRD Bombana periode 2024-2029. Menurutnya perempuan harus memiliki peran dalam pembangunan daerah, terutama berkaitan dengan kesejahteraan dan kemajuan kaum perempuan.

“Saya ingin mewakili suara perempuan,” ujarnya.

Ia menuturkan, partainya menargetkan Satu kursi pada Dapil 5 Kabupaten Bombana, Eva optimis merebut 1 kursi itu karena persiapan yang sudah matang.

Dia dan timnya juga telah menyusun strategi untuk untuk meraih target tersebut.

“Tentunya kuota perempuan harus diperhitungkan dalam pentas politik 2024. Saya dan tim akan rancang strategi sebaik-baiknya untuk mencapai target Golkar di Dapil 5,” Ucap Wakil Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Bombana ini.

Saat ini, ia fokus berjuang merebut kursi di dapilnya. Ia meminta doa dan dukungan masyarakat Kabaena agar niat baiknya itu dapat terkabulkan.

“Kami harap dukungan dan doanya. Saat ini, yang terpenting bagi saya adalah berjuang mendapatkan kursi untuk mewakili kaum perempuan,” pungkasnya
(ADN)

DPC Hanura Bombana Dukung WON Calon Gubernur Sultra

Bombana, SultraNET. | Momentum peringatan hari jadi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ke 15 Tahun (2006-2021), tanggal 21 Desember 2021, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Bombana menyatakan dukungan dan komitmen memenangkan Wa Ode Nurhayati (WON) sebagai Bakal Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara pada Pemilu 2024 mendatang.

Ketua DPC Hanura Bombana. Suritman, mengatakan WON sapaan akrab Wa Ode Nurhayati bukan nama baru dalam percaturan politik di Sultra, ia menyebut Ketua DPD Partai Hanura Sultra itu telah malang melintang sehingga memahami betul kebutuhan masyarakat.

Bahkan di usia sangat muda Srikandi asal Liya Togo Kabupaten Wakatobi itu telah menjabat sebagai Anggota DPR-RI periode 2009-2014, karena kepiawaiannya memperjuangkan rakyat Sultra, WON sudah digadang gadang sebagai Calon Kuat Gubernur saat itu, namun perpolitikan saat itu begitu dinamis sehingga ia diduga menjadi korban politik.

“Ibu WON sekarang sudah bangkit kembali bersama Partai Hanura, kita dan

Sulawesi Tenggara butuh sosok tangguh seperti beliau sebagai Gubernur,” ujar Suritman, Selasa (21/12/2021)

Sebagai wujud komitmen itu lanjut Suritman, sebagai syarat untuk dapat mengusung Calon Gubernur pada Pilgub 2024, dukungan bakal calon bakal menggunakan hasil perolehan kursi Partai pada Pemilu Legislatif 2024. Untuk itu seluruh pengurus berkomitmen untuk meningkatkan perolehan kursi DPRD Kabupaten, Provinsi dan DPR-RI.

“Untuk Kabupaten komitmen kita adalah meningkatkan jumlah perolehan kursi, sekaligus berjuang agar kursi DPRD Provinsi dari Dapil Bombana dan Konsel dapat terisi dan memaksimalkan suara untuk Calon DPR-RI agar target 1 Anggota DPR-RI dari Sultra dapat tercapai,” Pungkasnya. (IS)

Lantik Arusani Sebagai Bupati Busel, Gubernur Ali Mazi Tekankan Empat Hal

Kendari, SultraNET. | Usai melantik H. Laode Arusani sebagai Bupati Buton Selatan definitif untuk sisa masa jabatan 2017-2022, Selasa (31/12/2019) Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, SH menegaskan kepada Arusani untuk segera menindaklanjuti empat hal penting sebagai upaya menggenjot Pembangunan Daerah.

Empat hal yang dimaksud adalah pertama, Agar dapat meningkatkan daya saing daerah dalam mendorong investasi yang bertujuan menggerakkan sektor ekonomi Masyarakat, kemudian yang Kedua agar segera menetapkan Tata Ruang wilayah Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya Ketiga agar Berupaya untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat dan yang Keempat, menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam memberi semua jenis pelayanan pada tataran Birokrasi.

Suami Agista Aryani ini memaparkan bahwa untuk mewujudkan Daya

saing Daerah dalam upaya mendorong investasi yang bertujuan menggerakkan sektor ekonomi masyarakat, maka diperlukan fasilitas yang memadai untuk menunjang terciptanya iklim investasi yang kondusif serta adanya kepastian hukum dan proses pengurusan Perizinan yang cepat, tepat dan efisien.

Demikian pula dalam mempersiapkan Penyusunan tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Selatan agar dapat menginisiasi dan menyelesaikan Persoalan batas Wilayah administrasi pemerintahan antara Kabupaten Buton Selatan dan Kota bau-Bau.

” Sedangkan untuk upaya meningkatkan Ekonomi masyarakat di Kabupaten Buton Selatan, dibutuhkan keberanian dalam mengambil terobosan strategi yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan yang terakhir adalah, bahwa untuk Pelayanan Standar minimal saya menegaskan agar segera menetapkan Regulasi yang mengatur tentang Standar pelayanan Minimal bagi masyarakat dalam tataran Birokrasi di seluruh unsur Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.” Tegas Ali Mazi.

Sementara itu ditempat terpisah, saat menggelar Konferensi Pers di Salah satu Hotel di Kota Kendari, Bupati Buton Selatan yang baru saja dilantik berdasarkan Surat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74/4312 Tahun 2019 tanggal 20 September 2019 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Buton Selatan dan Pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Buton Selatan menguraikan bahwa hingga saat ini, pihaknya telah melaksanakan dan mempersiapkan hal hal yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti empat penegasan Gubernur Sulawesi tenggara, Ali Mazi, SH tersebut.

Hal-hal yang dilaksanakan urainya, yaitu yang Pertama, terhadap upaya Peningkatkan daya saing daerah dalam mendorong investasi yang bertujuan menggerakkan sektor ekonomi Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah melaksanakan beberapa kegiatan strategis yang salah satunya adalah menggelar Festival Budaya Buton Selatan yang telah di klaim sukses dan diselenggarakan pada awal Bulan Desember 2019.

Kemudian lanjutnya, yang Kedua. Penegasan untuk segera menetapkan Tata

Ruang wilayah Kabupaten Buton Selatan, Suami dari Hj. Waode Ruhania Arusani ini menegaskan bahwa Permasalahan Penetapan tata Ruang wilayah dipastikan akan selesai dalam waktu yang tidak lama.

” Poin Ketiga, dalam hal upaya untuk meningkatkan ekonomi Masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Buton selatan bersama seluruh Organisasi perangkat Daerah telah berupaya untuk menggenjot Pembangunan melalui upaya mendorong peningkatan dan pengembangan sektor unggulan seperti Sektor Perikanan dan kelautan,” Bebernya.

Dan yang terakhir Tambah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Buton Selatan ini, bahwa saat ini Pihaknya telah menerapkan Standar pelayanan Minimal dalam memberi semua jenis pelayanan pada masyarakat pada tataran Birokras (AM)

Gantikan Hasrat, Suriadin Pimpin DPC PDIP Bombana

Rumbia, SultraNET. | Mantan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Dewan Pimpinan Cabang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bombana, Suriadin ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai besutan Megawati Soekarno Putri itu untuk menjadi Ketua DPC PDIP Bombana periode 2009-2024 menggantikan Hasrat yang sesuai hasil Konferensi Daerah (Konferda), Sabtu (27/7/2019) lalu terpilih sebagai sebagai Sekretaris DPD PDIP Sulawesi Tenggara.

Ditemui disalah satu warkop di Ibu kota Bombana, Selasa (30/7/2019). Suriadin menuturkan ditunjuknya ia sebagai Ketua di Partai Berlambang Banteng itu, berdasarkan rekomendasi ke DPP PDIP melalui musyawarah bersama Konfercab penyempurnaan menggantikan Hasrat yang oleh Partai ditugaskan naik level sebagai Sekretaris DPD PDIP Sultra mendampingi Abu Hasan sebagai Ketua DPD

terpilih.

“Dengan naiknya beliau (Hasrat.red) kelevel lebih tinggi sebagai Sekretaris DPD, tentu memberi kesempatan terhadap kader lain untuk berproses melanjutkan kepemimpinannya dan partai mempercayakan itu kesaya, sebagai kader tentu saya harus selalu siap,” Ucap pria yang akrab disapa Surya itu.

Untuk itu, berkaca pada kepemimpinan Hasrat sebelumnya yang dinilai berhasil karena mampu mencetak tiga anggota DPRD pada pemilu 2019 lalu, di mana satu diantaranya sebagai anggota DPRD Provinsi, maka sebagai Ketua terpilih diakui Surya bakal berusaha lebih baik lagi agar pencapaian partai dimasa mendatang dapat mengalami peningkatan.

“Segera setelah kegiatan Kongres V di Bali dalam waktu dekat ini, kami segera melakukan kunjungan sekaligus konsolidasi ke seluruh PAC Kecamatan secara bergilir di Seluruh wilayah Bombana ini agar kosolidan partai semakin baik lagi,” Bebernya

Ditambahkannya bahwa keberhasilan partai PDIP menambah perolehan kursi DPRD di Kabupaten Bombana dan satu kursi untuk DPRD Provinsi tidak lepas dari kerja sama DPC dan seluruh PAC yang ada di wilayah itu.

“Jadi partai ini solid karena semua pengurus PAC di 22 Kecamatan bekerja untuk membesarkan Partai pada Pemilu yang lalu, saya berharap dan berupaya agar kedepannya bisa lebih solid lagi apalagi dalam menghadapi Pilkada atau Pemilu mendatang.” Pungkasnya

Pada Konfercab Penyempurnaan tersebut dipilih sebagai Sekretaris DPC PDIP Bombana Herlin dan sebagai Bendahara yaitu Yuslia, keduanya adalah Anggota DPRD Kabupaten Bombana terpilih untuk periode 2019-2024. (IS)

PBI Sultra Nilai Rusman Emba Lebih Ideal Pimpin PDIP Sultra

Kendari, SultraNET. | Pergantian tampuk kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD-PDIP) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2019-2024 mengundang berbagai spekulasi terkait Regenerasi Kepemimpinan Partai itu di bumi anoa.

Spekulasi yang banyak bermunculan dikalangan pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) tersebut menyusul keluarnya hasil Konferensi Daerah (konferda) PDIP, Sabtu (27/7/2019) yang mengejutkan banyak pihak karena menyepakati Bupati Buton Utara Abu Hasan, yang selama ini tidak diperhitungkan namun berhasil terpilih sebagai Ketua DPD PDIP Sultra menggantikan Ir. Hugua yang telah menahkodai Partai Berlambang Banteng selama sepuluh tahun itu.

Organisasi Masyarakat Putra Bangsa Indonesia (PBI) Provinsi Sulawesi Tenggara kepada awak media ini turut berspekulasi atas hasil Konferensi Daerah yang berlangsung di Hotel Same Kendari itu.

Melalui Ketua Ormas PBI Sultra, Abady Makmur menilai meskipun ia tidak meragukan kapasitas dan kapabilitas Abu Hasan sebagai Ketua DPD PDIP yang terpilih namun menurutnya Sosok Bupati Muna Rusman Emba lah sebagai sosok yang seharusnya paling ideal untuk memimpin Partai Besutan Megawati Soekarno Putri itu untuk lima tahun kedepan di Sulawesi Tenggara.

“Rusman Emba itu merupakan sosok yang saya nilai paling ideal seandainya beliau dipercaya dan diamanatkan sebagai ketua DPD PDIP Sultra untuk lima tahun kedepan bahkan sepuluh tahun kedepan. Sebab dia itu sangat berpengalaman dalam politik,” Tuter Abady Makmur.

Menurut Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Buton Selatan itu, penilaiannya itu bukan tak berdasar, karena jika dilihat dari riwayat karir Politiknya, Rusman Emba dinilai memiliki segudang pengalaman Politik yang mumpuni mulai dari politik lokal hingga pada level Nasional.

Dimana diketahui Bupati yang tengah mempersiapkan diri untuk maju sebagai kandidat calon Bupati Muna untuk periode kedua ini telah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Muna pada tahun 2004-2009, selanjutnya dipercaya sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2009-2014 dan kemudian melenggang ke senayan sebagai anggota DPD RI pada tahun 2014-2015 hingga akhirnya dia memutuskan kembali calon Bupati Muna dan terpilih sejak tahun 2015 hingga saat ini.



Rusman Rмба, Bupati Muna

Sementara Abu Hasan lanjut Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bombana dua periode ini diketahui sebelum menjalani karir politik sebagai Bupati Buton utara berkiprah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

“indikatornya adalah beliau telah menduduki berbagai jabatan politik mulai dari anggota DPRD Kabupaten, Anggota DPRD Provinsi, Anggota

DPD RI hingga dia kembali menjabat sebagai Bupati Muna. Nah dengan pengalaman berpolitik yang mumpuni itu beliau akan akomodatif terhadap berbagai kepentingan organisasi karena jika seseorang lama berkarir di panggung politik akan lebih dinamis dalam membangun komunikasi antara pengurus partai. sebab politik itu adalah identik dengan komunikasi," bebernya.

Dengan demikian, lanjutnya, dengan segudang pengalaman yang dimiliki oleh Rusman Emba sangat berpotensi untuk dapat membangun komunikasi yang ideal antara Semua pihak, utamanya dalam memimpin partai dibanding Abu Hasan.

Sementara itu ditempat terpisah Bupati Muna, Rusman Emba, ST saat dikonfirmasi, Minggu (28/7/2019) mengatakan bahwa apapun yang menjadi keputusan Partai yang telah dihasilkan melalui Konferensi Daerah itu merupakan hal yang harus dipatuhi dan dilaksanakan apalagi semuanya telah diputus melalui mekanisme partai.

Atas amanah Konferda padanya sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) atau yang lebih dikenal sebagai Ketua Desk Pilkada untuk Partai PDIP se-sulawesi Tenggara, dirinya merasa berkewajiban membantu Ketua DPD PDIP dalam menjalankan roda Organisasi dan memastikan bahwa dalam pencalonan Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara senantiasa memberi kesempatan yang seluas luasnya kepada kader partai.

" apa yang sudah diputuskan partai melalui konferda wajib saya laksanakan. Tugas saya adalah membantu Pak Ketua (Abu Hasan.red) dalam menjalankan roda Organisasi Partai dan tugas saya berikutnya adalah bagaimana saya memastikan diakomodirnya kader partai dalam bursa pencalonan sebagai Calon Kepala Daerah pada pemilukada tahun 2020 yang akan datang. "tuturnya (IS)

Mengejutkan, Abu Hasan Gantikan Hugua Nahkodai PDIP Sultra

Kendari, SultraNET. | Bursa pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya mendapat titik terang.

Mengejutkan sebab, Hugua yang diperkirakan bakal kembali memimpin partai besutan Megawati itu ternyata tak sesuai prediksi. Justru Abu Hasan yang tak pernah terfikirkan sebelumnya justru keluar sebagai jawara.

Abu Hasan diketahui telah terpilih menjadi Ketua DPC PDIP Buton Utara melalui Konfercab pekan lalu, belakangan muncul informasi bahwa Bupati Butur itu justru melengser posisi Hugua sebagai Ketua DPD PDIP Sultra.

Hal itu dibenarkan, Ahmad Afif Darvin, Ketua DPC PDIP Butur yang menggantikan posisi Abu Hasan.

Melalui sambungan telepon, Afif mengaku telah mengganti posisi Abu Hasan sebagai Ketua DPC PDIP Butur, karena Abu Hasan dipilih DPP PDIP sebagai Ketua DPD PDIP Sultra.

“Ia benar sudah terpilih, saya yang menggantikan dia (Abu Hasan, red),”

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Anggota DPRD Sultra dari PDIP, Nursalam Lada, masih melalui telepon seluler, Wakil DPRD Sultra itu membenarkan jika Abu Hasan memang telah menggantikan posisi Hugua.

“Ia tadi pagi sudah ada info valid dari DPP, kalau Abu Hasan menahkodai PDIP Sultra,” singkatnya. Sabtu 27/7.

DPW PKB Sultra Solid Usung Cak Imin Kembali Pimpin PKB

Kendari, SultraNET. | Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai PKB Provinsi Sulawesi Tenggara, Jaelani memastikan dukungan penuh untuk mengusung kembali Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai ketua umum PKB periode 2019-2024.

“PKB Sultra mendukung Cak Imin (Muhaimin Iskandar) secara aklamasi menjadi Ketua Umum PKB 2019-2024, pada Muktamar PKB bulan Agustus 2019 di Nusa Dua, Bali,” ujar Jaelani di Jakarta, Minggu (14/07/19).

Dukungan tersebut kata Jaelani, datang dari para pengurus DPC hingga DPW lantaran mereka menilai kepemimpinan Cak Imin membuat PKB memperoleh suara cukup signifikan dalam Pemilu 2019. Jaelani menuturkan Cak Imin dinilai berhasil memimpin partai. Ketum mampu merepresentasikan tokoh muda, santri agamis dan nasionalis tutur Jaelani.

“Indikatornya terlihat jelas dari peningkatan suara, baik secara nasional untuk jumlah kursi di DPR RI maupun di daerah seperti hasil signifikan yang di raih DPW dan DPC se Sulawesi Tenggara. Cak Imin juga sukses mengantar Joko Widodo-Ma’aruf Amin terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 lalu,” ungkap Jaelani.

Jaelani juga menambahkan bahwa Cak Imin berhasil menjaga soliditas partai sehingga menghadapi Pemilu 2019 situasi internal dan eksternal PKB benar-benar kondusif untuk menggerakkan seluruh mesin struktur, kultur dan potensi lainnya.

“Cak Imin merupakan figur pemersatu dan memberikan rasa nyaman bagi kader, simpatisan maupun pengurus PKB karena ketokohan dan kapasitas yang dimilikinya,” pungkas Jaelani. (Ry)